

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN JAMBAAN DI DESA TAMAN KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO

Junaidi¹⁾, Hari Susanto²⁾, Dini Noor Aini³⁾

¹⁾Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, FISIP Adminitrasi Publik, Situbondo

²⁾Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, FISIP Adminitrasi Publik, Situbondo

³⁾Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, FISIP Adminitrasi Publik, Situbondo

Email: junedznedzy@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Pembangunan kesehatan diSitubondo bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan hidup sehat bagi setiap orang. Salah satu fasilitas kesehatan yang sangat penting adalah jamban keluarga. Banyak masyarakat yang tidak memiliki jamban di setiap rumahnya sehingga masyarakat melakukan aktivitas BABS di sungai. Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pembangunan Jamban Keluarga. Dinas Sosial menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) salah satunya yaitu dengan menerapkan Program pembangunan jamban. Program ini di laksanakan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi serta meningkatkan kualitas kesehatan di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Program Pembangunan Jamban di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan secara keseluruhan mengenai bentuk, fungsi dan makna ungkapan lapangan. Informennya yaitu pegawai Dinas PUPP sebagai Informen Kunci, aparat pemerintah Desa Taman sebagai Informen Utama dan Masyarakat penerima bantuan sebagai informen pendukung, Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ¹⁾KSM sudah melaksanakan Tahapan-Tahapan di antaranya Pembukaan Rekening KSM, Pencairan Dana, Penarikan Dana, pelaksanaan Pekerja Swakelola, Pengelolaan Dana, Pengawasan Pemantauan, Evaluasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban. ²⁾Masyarakat penerima bantuan tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tahapan tersebut karena masyarakat menerima bantuan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, hal ini di lakukan guna menghindari penyalahgunaan uang bantuan pemerintah ³⁾Masyarakat penerima bantuan program pembangunan jamban sebanyak 34 orang.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembangunan, Program Jamban Keluarga.

ABSTRACT

Implementing health development in Situbondo aims to increase awareness, willingness, and a healthy lifestyle for everyone. One crucial health facility is the family toilet. Many residents lack toilets in their homes, leading them to defecate in rivers. Based on Situbondo Regent Regulation Number 32 of 2023 concerning Guidelines for Implementing the Family Toilet Development Program, the Social Services Agency implements a clean and healthy lifestyle (*Pola Hidup Bersih dan Sehat - PHBS*). One of these initiatives is the toilet development program. This program aims to increase sanitation service coverage and improve health quality in Taman Village, Sumbermalang District, Situbondo Regency.

The purpose of this study was to determine the implementation of the Toilet Development Program in Taman Village, Sumbermalang District, Situbondo Regency.

This study used a descriptive qualitative method to provide a comprehensive description of the form, function, and meaning of expressions in the field. The informants were employees of the Public Works and Housing Agency (*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman - PUPP*) as key informants, Taman Village government officials as primary informants, and community members who received assistance as supporting informants. This study used observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The data analysis used an interactive analysis model.

The results of this study indicate that 1) SHGs (Self-Help Groups) has implemented the following stages: SHG Account Opening, Fund Disbursement, Fund Withdrawal, Self-Managed Workers, Fund Management, Monitoring, Evaluation, Reporting, and Accountability. 2) Community beneficiaries were unaware of and not involved in these stages because they received assistance in the form of goods, not cash. This was done to prevent misuse of government assistance funds. 3) 34 community members received assistance for the latrine construction program.

Keywords: implementation, construction, family latrines program.

PENDAHULUAN

Salah satu faktor permasalahan sosial di masyarakat yang terjadi di setiap daerah ialah kemiskinan. Ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang layak dan baik merupakan arti dari kemiskinan. Banyak faktor yang melatar belakangi kemiskinan mulai dari jumlah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, dan permasalahan lainnya. Masyarakat dapat dikategorikan miskin apabila kurangnya ketersediaan bahan pangan, tempat tinggal yang tidak layak dan kurangnya memperhatikan kondisi kesehatan.

Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar namun kurang mendapatkan perhatian dan belum menjadi prioritas pembangunan di Indonesia .Permasalahan pembangunan sanitasi di Indonesia merupakan masalah tantangan sosial budaya, salah satunya adalah perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar sembarangan atau BABs, khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan higienis lainnya. Salah satu fasilitas kesehatan yang sangat penting adalah jamban keluarga, jamban keluarga adalah suatu bangunan yang dipergunakan untuk membuang tinja atau kotoran manusia atau hal najis bagi suatu kelaurga yang lazim disebut kakus/WC. Hal ini kemudian menjadi masalah bagi masyarakat miskin, dimana mereka sulit memenuhi kebutuhan air minum yang berkualitas karena dipengaruhi keadaan ekonomi.

Pembangunan kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Peningkatan drajat kesehatan dapat terwujud melalui terciptanya masyarakat Indonesia yang ditandai dengan perilaku masyarakat dilingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau kesehatan yang bermutu secara adil dan merata (Kemenkes RI, 2009). Masalah kesehatan lingkungan permukiman khususnya pada pembuangan tinja merupakan salah satu dari berbagai masalah kesehatan yang perlu mendapatkan prioritas. Pencemaran lingkungan salah satunya disebabkan oleh pengelolaan lingkungan itu sendiri tidak memenuhi syarat sehat, seperti pengelolaan jamban sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia.

Program merupakan hal paling penting dan harus ada apabila ingin mewujudkan suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu agar lebih terstruktur sehingga apa yang dilakukan akan lebih produktif dan efisien. Adapun program yang telah direkomendasikan oleh Dinas Sosial untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) salah satunya yaitu Program pembangunan jamban yang berlandas pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pembangunan Jamban Keluarga. Program Pembangunan Jamban Keluarga ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Situbondo melalui perluasan akses jamban dalam rangka mengurangi kebiasaan masyarakat Buang Air Besar Sembarangan(BABs), sesuai dengan Instruksi Bupati Nomor I Tahun 2015 tentang Gerakan Tuntas Jamban di Kabupaten Situbondo dan Instruksi Bupati Situbondo Nomor I Tahun 2018 tentang Percepatan Menuju

Kabupaten Situbondo *Open Defecation Free(ODF)* Tahun 2019. Selain Instruksi Bupati, gerakan stop BABS juga mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No.658/34834/023.3/2021 tentang Upaya Propinsi Jawa Timur menuju 0 persen BABs / bebas dari Buang Air Besar Sembarangan 2024.

Desa Taman merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sumbermalang yang menerima program pembangunan jamban keluarga. Di Desa Taman sangat minim ketersediaan fasilitas kamar mandi umum yang bisa di gunakan masyarakat sekitar, oleh karena itulah masyarakat yang tidak memiliki fasilitas kamar mandi terpaksa BAB di sungai, di aliran sawah, bahkan ada yang BAB di halaman rumahnya, hal tersebut menjadi alasan kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian di Desa Taman. Pemerintah memberikan solusi dengan adanya Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pembangunan Jamban. Di dalam peraturan Bupati tersebut, terdapat tiga tahapan penyelenggaraan yang di uraikan dalam Peraturan Bupati tersebut di antaranya adalah 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Perencanaan 3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Fisik. Berdasarkan tahapan penyelenggaraan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuju pada Tahapan Pelaksanaan Fisik yang meliputi:

1. Pembukaan Rekening KSM
2. Pencairan Dana
3. Penarikan Dana
4. Pelaksanaan Pekerja Swakelola
5. Pengelolaan Dana
6. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti menetapkan sebuah judul “Analisis pelaksanaan program pembangunan jamban di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo”

TINJAUAN PUSTAKA

Admininstrsai Publik

Administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif (Harbani Pasolong 2010:8). Menurut Nicholas dalam Harbani Pasolong (2010 :8) Administrasi publik adalah suatu kombinasi suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannnya dengan dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

Kebijakan Publik

Kebijakan selalu menjadi polemik yang tak pernah berhenti dipermasalahkan baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak dunia usaha, instansi atau organisasi profit maupun non profit. Secara

etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara. Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Lahirnya kebijakan publik di latar belakang oleh adanya upaya dalam memberikan solusi bagi masalah dan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, meskipun dalam penyelenggaraannya harus melalui proses yang panjang sejak penentuan agenda, negosiasi dan pengesahan kebijakan sampai pada tahap implementasi dan evaluasi kebijakan itu sendiri yang mana memiliki manfaat. Manfaat evaluasi sendiri yakni mampu menjadikan kebijakan publik sebagai putusan dalam jangkaan yang luas serta persepektif kedepan yang bersifat relatif lama maka dalam perumusannya menyertakan tujuan kebijakan tersebut

Pengertian Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan sebuah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang proses dalam pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan sebuah pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Analisis kebijakan adalah bentuk penelitian terapan yang dijadikan untuk mencapai tingkat pengetahuan yang lebih mendalam tentang isu-isu teknik sosial yang membawakan solusi-solusi yang lebih baik Menurut William N. Dunn, analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan

Menurut William N. Dunn dalam Yanti Fatmariyanti (2023: 3) Terdapat lima prosedur yang harus dilewati dalam sebuah proses analisis kebijakan, yaitu diantaranya:

1. Perumusan Masalah (*Definisi*)

Perumusan masalah menghasilkan informasi mengenai kondisi- kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan masalah dapat membantu memberikan beberapa dugaan-dugaan yang masih belum ditemukan karena letaknya yang tersembunyi, serta menemukan secara detail apa yang menjadi penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang mungkin saja bisa terjadi, menyesuaikan adanya perbedaan pandangan-pandangan yang ada, serta mulai dapat merencanakan pembuatan kebijakan yang baru.

2. Peramalan (*Prediksi*)

Menyediakan informasi tentang konsekuensi di masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Peramalan dapat menguji masa depan yang bersifat masuk akal, adanya

kemungkinan terhadap apapun yang dapat terjadi, dan secara normatif bernilai, memperkirakan tentang akibat dari kebijakan yang ada atau kebijakan yang masih diusulkan, mulai mengenali macam-macam kendala yang mungkin saja bisa menghambat proses pencapaian tujuan, dan memperkirakan tentang kelayakan politik seperti dukungan dan oposisi dari berbagai pilihan yang ada.

3. Rekomendasi (*Preskripsi*)

Menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi kebijakan di masa datang dari suatu pemecahan masalah yang ada. Rekomendasi disini dapat membantu memperkirakan adanya risiko beserta tingkat pengaruhnya dan adanya bentuk pertanggungjawaban secara administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Pemantauan (*Deskripsi*)

Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan. Pemantauan membantu tingkat kepatuhan, menemukan beberapa akibat yang tidak diharapkan dari pengimplementasian kebijakan atau bahkan program, mengidentifikasi adanya kendala-kendala yang bisa saja menghambat proses pengimplementasian serta menentukan dan mencari tahu pihak-pihak yang terlibat dan memiliki tanggung jawab disetiap kebijakan.

5. Evaluasi

Menyediakan informasi terkait nilai dan kegunaan dari konsekuensi dengan pemecahan masalah. Evaluasi tidak hanya berfokus pada seberapa besar permasalahan sudah bisa teratasi, tetapi juga memberikan bantuan dalam penjelasan lebih mendalam dan kritik yang dibutuhkan terhadap nilai-nilai yang mendasari sebuah kebijakan tersebut.

Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Warjio Afandi.2015: 324).

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).

Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann & Wegrich (2007: 4) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut:

1. Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan.
2. Alokasi sumberdaya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
3. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrative atau pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (*stakeholders*).

Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010: 4) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya (Pulzl & Treib, 2007: 5).

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana individu atau kelompok mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Secara konvensional, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan individu atau masyarakat yang berada di bawah garis tertentu. Secara umum pengertian dari kemiskinan sangat beragam, tergantung dasar pemikiran dan cara pandang seseorang. Namun kemiskinan identik dengan ketidakmampuan sekelompok masyarakat yang terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi (kemiskinan struktural). Kemiskinan merupakan masalah serius yang terdapat di berbagai negara termasuk negara berkembang seperti negara Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan adanya kebijakan yang mengatur yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk memutus rantai penyebab kemiskinan secara keseluruhan bukan salah satu aspek saja. Secara umum kemiskinan terbagi atas dua, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok

paling minimal, antara lain sandang, pangan, perumahan dan lainnya. Kemiskinan relatif merupakan kondisi tingkat kemiskinan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kemiskinan relatif akan selalu terjadi karena merupakan perbandingan antara tingkat kemiskinan individu dengan individu lainnya.

Menurut Spicker, penyebab kemiskinan dibagi menjadi dalam 4 mazhab, yaitu:

- a. *Individual Explanation*: Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud misalnya malas dan kurang sungguh-sungguh dalam segala hal, termasuk dalam bekerja. Mereka juga sering salah dalam memilih, termasuk dalam memilih sekolah, memilih pekerjaan, jalan hidup, tempat tinggal, dan lainnya.
- b. *Familiar Explanation*: Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan cenderung disebabkan oleh faktor keturunan. Dalam hal ini misalnya tingkat pendidikan orang tua yang rendah telah membawa ke dalam kemiskinan karena kurangnya skill yang dimiliki untuk bekerja ditempat yang layak. Akibatnya, sang orang tua juga tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya sehingga pada akhirnya si anak juga jatuh kepada kemiskinan.
- c. *Subcultural Explanation*: Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat-istiadat, atau akibat karakteristik perilaku lingkungan. Misalnya, kebiasaan yang bekerja adalah kaum perempuan, kebiasaan yang enggan untuk bekerja keras dan menerima apa adanya, keyakinan bahwa mengabdikan kepada para raja atau orang terhormat meski tidak diberi bayaran dan lainnya yang berakibat pada kemiskinan. Terkadang orang seperti ini justru tidak merasa miskin karena sudah terbiasa dan memang kulturenya yang sudah demikian.
- d. *Structural explanation*: Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan timbul akibat dari ketidakseimbangan, perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturan lain menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lainnya hingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas.

Sayogyo membedakan masyarakat kedalam beberapa kelompok:

1. Sangat Miskin Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya dibawah setara 250 kg beras ekuivalen setiap orang dalam setahun penduduk yang tinggal di perkotaan.
2. Miskin Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berpendapatan setara dengan 240 kg beras sampai 320 kg beras selama setahun untuk penduduk yang tinggal di desa, sedangkan untuk penduduk yang tinggal di perkotaan berkisar 360 sampai dengan 480 kg.
3. Hampir Cukup Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya setara dengan 320 kg beras sampai dengan 480 kg beras

dalam setahun untuk penduduk yang tinggal di pedesaan, serta di atas 720 kg untuk penduduk yang tinggal di perkotaan.

4. Cukup Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya lebih dari 480 kg beras setiap orang dalam setahun untuk penduduk yang tinggal di pedesaan, dan di atas 720 kg beras setiap orang per tahun untuk yang tinggal di perkotaan.

Program

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan. Menurut Setiawan (2015: 17), program adalah suatu rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan akan dijalankan. Dapat disimpulkan bahwa program merupakan rancangan mengenai usaha yang akan dijalankan. Menurut Jones (1984), program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Artinya, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Jamban adalah suatu fasilitas pembuangan tinja manusia. Jamban terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya (Abdullah, 2010). Jamban keluarga adalah suatu fasilitas pembuangan tinja bagi suatu keluarga (Kemenkes RI, 2009). Jamban adalah suatu bangunan yang digunakan untuk tempat membuang dan mengumpulkan kotoran atau najis manusia, biasa disebut kakus/wc. Sehingga kotoran tersebut akan tersimpan dalam suatu tempat tertentu dan tidak menjadi penyebab atau penyebaran penyakit dan mengotori lingkungan pemukiman (Kemenkes RI 2003). Dengan bertambahnya penduduk yang tidak sebanding dengan area pemukiman, maka masalah pembuangan kotoran manusia meningkat, dilihat dari segi kesehatan masyarakat masalah pembuangan kotoran manusia merupakan masalah yang pokok untuk sedini mungkin di atasi, karena kotoran manusia (*feces*) adalah sumber penyebaran penyakit.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif dimana fokus dari penelitiannya yaitu menggambarkan secara keseluruhan mengenai bentuk, fungsi dan makna ungkapan larangan. Lokasi penelitian yaitu Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Pembahasan

Hasil Pembahasan merupakan suatu proses dengan melakukan beberapa pengelompokan terkait data yang telah didapatkan sebelumnya menggunakan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan dengan melakukan observasi di lapangan. Lokasi dalam penelitian sangat dibutuhkan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Untuk lokasi penelitian ini berpusat di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

Sebelum KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) melaksanakan tahapan-tahapan tersebut pihak yang bersangkutan dari Dinas PUPP telah mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut, Adapun jadwal pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Rekening KSM
2. Pencairan Dana
3. Penarikan Dana
4. Pelaksanaan Pekerja swakelola
5. Pengelolaan Dana
6. Pengawasan
7. Pemantauan
8. Evaluasi
9. Pelaporan
10. Pertanggungjawaban

1. Pembukaan Rekening KSM

Pembukaan rekening merupakan tahapan awal yang ada pada setiap kegiatan pembangunan, tahapan ini harus dilakukan dan menjadi syarat yang harus dilakukan. Pembukaan rekening KSM harus atas nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan pemegang specimen rekening berjumlah 2 (dua) orang yaitu ketua KSM dan bendahara KSM.

2. Pencairan Dana

Pencairan dana merupakan proses penting dalam keuangan yang melibatkan pengeluaran atau penyaluran dana sesuai dengan kebutuhan atau kewajiban yang telah ditetapkan. Setelah penyusunan rencana kerja KSM dilakukan dan dituangkan dalam dokumen rancangan kerja KSM, maka KSM dapat mengajukan pencairan dana kepada BKAD (Badan Kerjasama Antar-Desa atau Badan Keuangan dan Aset Daerah) melalui perangkat daerah pelaksana program dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh BKAD.

3. Penarikan Dana

Penarikan dana dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mengajukan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah diverifikasi oleh tenaga Fasilitator/Pendamping Lapangan (TFL) kepada perangkat daerah untuk mendapatkan rekomendasi penarikan dana dari PA (Pengguna Anggaran) program.

4. Pelaksanaan pekerja swakelola

Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan kegiatan dimana pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi oleh kelompok Masyarakat (KSM) serta didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Segala perubahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan fisik harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan.

5. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana sepenuhnya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja KSM dalam pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Jamban Keluarga.

6. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi

Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) selaku pendamping masyarakat dan Tim Pengelola Program Pembangunan Jamban Keluarga yaitu mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan hingga akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola. Dari hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi tersebut, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Pengelola Program Pembangunan Jamban Keluarga memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban memuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Laporan pelaksanaan kegiatan adalah laporan yang berisi tujuan, manfaat, fungsi, serta isi kegiatan dari awal hingga akhir secara rinci. Sedangkan laporan penggunaan dana merupakan laporan wajib berisi rincian dana yang dipergunakan untuk suatu kegiatan.

Faktor Penghambat

Dalam suatu proses pelaksanaan program merupakan suatu yang sangat sering terjadi, dan setiap program mempunyai masalah sehingga penanganannya pun biasanya dikembalikan kepada para aktor yang membuat suatu program dalam merespon masalah-masalah yang muncul dalam proses pelaksanaan program. Program Pembangunan Jamban Keluarga melalui Tim Koordinasi program di setiap masing-masing daerah diberi mandat untuk melaksanakan program tentunya juga akan menemui masalah sehubungan dengan pelaksanaan program.

Faktor Pendukung

Adapun dalam proses pelaksanaan program Pembangunan Jamban di Desa Taman, selain penghambat tentunya ada juga yang menjadi faktor pendukung sehingga program tersebut harus tetap berjalan dan dilaksanakan untuk direalisasikan dengan baik. Seperti yang di sampaikan di atas bahwasanya pihak KSM sangat bersyukur karena program ini telah berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala adapun yang menjadi faktor pendukung dari program ini yaitu mudahnya akses penyaluran air yang sangat membantu dalam proses pembangunan jamban tersebut selain itu yang menjadi faktor pendukung lainnya yaitu luasnya pengalaman seorang

tukang sehingga ketika kami menyampaikan bentuk fisik bangunan seorang tukang langsung dapat memahami dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti membuat kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan “ Analisis Pelaksanaan ” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan jamban di desa Taman kecamatan Sumbermalang kabupaten Situbondo di lihat dari hasil penelitian di atas dapat di simpulkan sudah terlaksana dengan baik, Aspek aspek tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Spesifikasi rincian program, menunjukkan bahwasanya dalam tahapan ini sudah tertera jelas program yang dijalankan yaitu pembangunan jamban yang terdiri dari 7 tahapan pelaksanaan di antaranya : Pembukaan Rekening KSM, Pencairan Dana, Penarikan Dana, Pelaksanaan Pekerja Swakelola, Pengelolaan Dana, Pengawasan, Pemantuan, dan Evaluasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dari tahapan-tahapan tersebut semuanya sudah terlaksana dengan baik.
 - b. Alokasi Sumberdaya, menunjukkan bahwasanya dana langsung turun ke rekening KSM dengan anggaran 2,5jt per unit, dan personil yang akan melaksanakan dan yang bertanggung jawab atas program tersebut adalah KSM.
 - c. Keputusan, menunjukkan penerima bantuan program ini di tentukan melalui musyawarah seluruh pemerintah Desa Taman dengan jumlah penerima sebanyak 34 orang, hal ini di putuskan berdasarkan data kemiskinan yang telah di saring melalui musyawarah tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti membuat kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan “ Analisis Pelaksanaan ” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pihak KSM sebaiknya menyampaikan secara detail terkait biaya oprasional pembangunan jamban tersebut mengingat letak per dusun yang ada di desa taman banyak yang kesulitan air.
2. Di dalam proposal pengajuan penerima bantuan jamban sebaiknya diperbanyak dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki fasilitas jamban guna mewujudkan situbondo bersih dan bebas dari perilaku buang air besar sembarangan (BABs).

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H, M.H. Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Dr. Hasan Muchtar Fausi, S.Sos, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
3. Drs. Hari Susanto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dini Noor Aini, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian.
6. Kepala dan aparatur sipil negara Dinas PUPP Situbondo yang telah memberikan informasi dalam penelitian.

7. Ketua, Anggota KSM dan masyarakat Desa Taman yang dengan senantiasa memberikan waktunya dan yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan, dukungan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu.

REFERENSI

BUKU:

- Abdul Wahab, Solichin 2010. Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aprillia Theresia dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung, Alfabeta, 2014
- Caiden, Gerald E. 1982. *Public Administration Second Edition*. California: Palisades Publishers.
- Soenarko. (2005). Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (edisi ke 26). Bandung: Penerbit Alfabeta.

JURNAL:

- Abidin1, A. (2021). Implementasi Kebijakan Program Gerakan Sanitasi . *p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534*, 65-61.
- Binti, M. T. (2016). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. *Vol.3 No.6 Juli 2016*, 69-78.
- Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, A. M. (n.d.). Kebijakan Publik . 2020.

Peraturan perundang-undangan

- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pembangunan Jamban Keluarga